

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI KELURAHAN MARGOMULYO KABUPATEN NGAWI

Raihanah Gustiputri, Kismartini, Retna Hanani

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

13/3/25

ABSTRACT

Indonesia's national development prioritizes health improvements, including efforts to accelerate stunting reduction, a condition caused by malnutrition and chronic infection during the First 1000 Days of Life (HPK). In 2021, SSGI reported that Indonesia's stunting prevalence reached 24,4% with Ngawi Regency at 28,5% and Margomulyo Village recording the highest prevalence at 37,46%. To address this issue, the Ngawi Regency Government implemented policies under Regent Regulation No. 4.A of 2020 through the Family Independence Program, the Healthy Living Community Movement (Germas) and the HPK Movement. This study aims to analyze the implementation of policies to accelerate stunting reduction in Margomulyo Village and identify supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative method with Van Meter and Van Horn's top-down approach, data collection includes interviews, observations and literature studies. The findings indicate that the Family Independence Program faces challenges such as low public awareness of nutritional health and economic constraints. Therefore, increasing nutritional education and expanding private sector and community support are necessary to improve access to nutritious food for at-risk families. Meanwhile, the Germas Program and the HPK Movement have been successfully implemented, supported by strong local government commitment and cross-sector coordination. Strengthening community involvement and optimizing resources are crucial to ensuring sustainable stunting reduction efforts in the region. These factors have contributed to a decline in stunting prevalence in Margomulyo Village, Ngawi Regency.

Keywords: *Service Quality, Local Tax, Pakde Semar Hebat!*

PENDAHULUAN

Kebijakan di sektor kesehatan yang dilaksanakan dengan baik merupakan faktor penting untuk eskalasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan segala

bentuk tanggung jawabnya dibebankan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan sistem sinkronisasi penguatan kesehatan masyarakat. Permasalahan gizi merupakan satu dari sekian banyaknya permasalahan di sektor kesehatan yang sampai saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah.

World Health Organization (WHO) melaporkan, pada tahun 2022 malnutrisi merupakan permasalahan gizi yang kerap kali timbul. Malnutrisi tersebut mencakup *stunting*, *wasting*, dan *overweight*. Berdasarkan catatan *Global Nutrition Report* pada tahun 2020 terdapat 149,2 juta (22,2%) anak di bawah lima tahun menderita *stunting*, sebanyak 45,4 juta (6,7%) balita menderita *wasting*, dan 38,9 juta (5,7%) balita menderita *overweight*, jumlah tersebut merupakan jumlah kejadian global.

Di Indonesia berdasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi status gizi balita mengalami *stunting* (24,4%), *wasting* (7,1%), dan *overweight* (3,5%).

Status Gizi Balita Global dan Indonesia Tahun 2021



Sumber: *Global Nutrition Report dan Hasil SSGI, 2021*

Provinsi Jawa Timur dengan populasi penduduk yang sangat besar, berdasarkan *Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)* tahun 2022 angka prevalensi *stunting* nya berada di 19,2%, sedangkan target nasional di tahun 2024 *stunting* harus turun ke angka 14%. Sehingga juga menjadi

perhatian pemerintah dalam penanganan *stunting* dan penurunan kemiskinan ekstrim. Angka *stunting* di Jawa Timur tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan pencegahan yang efektif (Kemenko PMK, 2022).

Prevalensi Balita *Stunting* Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>
Kabupaten Jember	34,9
Kabupaten Bondowoso	32
Kabupaten Situbondo	30,9
Kabupaten Ngawi	28,5
Kabupaten Lamongan	27,5
Kabupaten Bangkalan	26,2
Kota Batu	25,2
Kabupaten Tuban	24,9
Kabupaten Bojonegoro	24,3

Sumber: *BPS Jawa Timur, 2023*

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu wilayah dengan angka prevalensi balita *stunting* 28,5% yang sangat tinggi dan jauh dari rata-rata prevalensi Provinsi Jawa Timur yang berada di 19,2%. Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki tanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, untuk menjalankan pemenuhan tanggung jawab dan komitmen tersebut. Pemerintah Kabupaten Ngawi

mengeluarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.

Desa/Kelurahan Lokus *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Desa/ Kelurahan	Jumlah Balita <i>Stunting</i>	Prevalensi <i>Stunting</i>
Margomulyo	106	37,46
Sumberbening	80	21,05
Tepas	73	19,06
Pandean	58	14,76
Sidorejo	58	16,29
Tawun	55	22,09
Katikan	50	25,00
Karanggupito	47	16,04
Cepoko	39	14,55
Tambakromo	36	14,12

Sumber: DP3AKB Kabupaten Ngawi, 2023

Kelurahan Margomulyo merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ngawi yang merupakan Ibukota Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data di atas Kelurahan Margomulyo memiliki jumlah anak *stunting* sebanyak 106 anak dan prevalensinya mencapai 37,46%. Tingginya jumlah balita yang menderita *Stunting* di Kelurahan Margomulyo disebabkan karena adanya persoalan masih belum meratanya pengetahuan para orang tua khususnya ibu yang memiliki balita mengenai pentingnya gizi dan balita tidak diperhatikan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, melakukan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi.

Hal ini yang mendukung penulis tertarik untuk mengkaji “Implementasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi” mengacu pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan analisis faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan menggunakan pendekatan *top-down* menurut Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi?

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1987, dalam Keban 2014) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keban juga menyatakan bahwa Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat merupakan pihak yang harus mendapatkan pelayanan.

B. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Shauma & Purbaningrum, 2022) menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa variabel yang dapat mendorong dan menghambat implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Ukuran kebijakan yang melihat bagaimana standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan;
- b. Sumber daya yang dengan melihat ketersediaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas penunjang;

- c. Karakteristik agen pelaksana mengacu pada organisasi formal dan informal yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis dalam setiap program dan ketaatan lembaga terhadap SOP tersebut sepanjang pelaksanaan kebijakan;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan, yang mengharuskan *implementor* kebijakan mengetahui hal-hal yang harus dikerjakan untuk mewujudkan tujuan implementasi, serta menjalin koordinasi yang tepat dengan pihak-pihak lain yang terlibat;
- e. Disposisi/Sikap Pelaksana adalah pengetahuan pelaksana, pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, serta sikap mereka terhadap kebijakan; dan
- f. Faktor sosial, politik, dan ekonomi mencakup penerimaan masyarakat terhadap program tersebut, keselarasan kebijakan pemerintah dengan tujuan program, dan kecukupan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya.

C. *Stunting*

Menurut WHO (2015), secara umum *stunting* merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-

anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti akan memberikan gambaran serta penjelasan terkait persoalan yang akan diteliti oleh penulis, yakni Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi. Peneliti akan menjabarkan data secara sistematis merujuk pada fakta yang ada di lapangan.

Selanjutnya, peneliti akan menggambarkan secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun tempat atau wilayah pelaksanaan penelitian ini adalah di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni teknik yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019:287).

Informan pada penelitian ini adalah *Technical Assistant* Satgas *Stunting* DP3AKB Kabupaten Ngawi, Lurah Margomulyo, Ketua Tim Percepatan Penanganan *Stunting* Kelurahan Margomulyo, Kader TPK Puskesmas Kelurahan Margomulyo dan Orang Tua

Balita *Stunting*. Pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi

1. Kemandirian Keluarga

Kemandirian keluarga memegang peran penting dalam menurunkan angka *stunting* guna mencapai perubahan berkelanjutan dalam penanganan masalah ini. Partisipasi aktif keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi faktor kunci dalam upaya tersebut. Meskipun telah tersedia berbagai layanan dan fasilitas kesehatan, tingkat kemandirian keluarga di Kelurahan Margomulyo masih terklasifikasi, yakni terdapat masyarakat dengan kesadaran tinggi, masyarakat dengan kesadaran tapi belum konsisten terkendala faktor ekonomi, masyarakat dengan pengetahuan terbatas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Supriyanto dan Azhar Abdul Rahman dalam penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Salem

Kabupaten Brebes, bahwa pemahaman orang tua balita *stunting* rendah dan keterbatasan ekonomi orang tua balita *stunting* sulit menyebabkan bahaya *stunting*. Sedangkan, agen pelaksana, dalam hal ini Pemerintah terkait setempat dan seluruh elemen yang terlibat telah bersatu padu untuk menyelenggarakan penerapan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* yang terintegrasi. Masyarakat yang sudah memahami umumnya terdiri dari ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan posyandu atau rutin menerima edukasi gizi. Mereka mulai mengaplikasikan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari serta memahami kaitan antara gizi yang baik dengan kesehatan keluarga. Kelompok ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang dan perannya dalam pencegahan *stunting*.

Sementara masyarakat dengan pengetahuan sudah yang memahami pentingnya gizi tetapi penerapannya masih terkendala. Misalnya, mereka mengetahui bahwa protein hewani sangat penting bagi pertumbuhan anak, namun belum dapat secara konsisten menyediakannya dalam menu harian. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kebiasaan konsumsi, atau kurangnya variasi dalam pola makan sehari-hari. Hambatan ekonomi memang

menjadi faktor utama yang memengaruhi penerapan pola makan sehat di masyarakat. Persepsi bahwa makanan sehat itu mahal membuat sebagian keluarga sulit untuk mengakses bahan pangan bergizi, sehingga lebih memilih makanan yang lebih murah namun kurang bernilai gizi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi dan pemberdayaan yang lebih spesifik agar masyarakat dapat memahami cara memenuhi kebutuhan gizi dengan bahan pangan yang lebih terjangkau dan tersedia di lingkungan sekitar.

Upaya yang telah dilakukan ialah edukasi, pendampingan dan pemberdayaan yang lebih spesifik agar masyarakat dapat memahami cara memenuhi kebutuhan gizi dengan bahan pangan lokal yang lebih terjangkau dan tersedia di lingkungan sekitar, sehingga pengetahuan mengenai kesadaran pentingnya kesehatan gizi dapat merata.

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) merupakan inisiatif nasional yang berfokus pada penguatan perilaku hidup sehat yang bertujuan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular (PTM). serta menurunkan angka penyakit menular dan *stunting*.

Dengan adanya Germas, pemerintah berharap masyarakat menjadi lebih peduli pada kesehatan dirinya dan keluarganya melalui perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat. Germas mencakup berbagai program yang dirancang untuk menanamkan kebiasaan sehat pada masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas.

Penyuluhan Edukasi Hidup Sehat di Kantor Kelurahan Margomulyo



Sumber: Observasi Peneliti, 2024

Edukasi secara langsung mengenai pola makan bergizi seimbang, skrining berkala melalui posyandu untuk pencegahan dini terhadap penyakit telah dilaksanakan, namun harus diiringi dengan adanya kesadaran untuk melakukan peningkatan aktivitas fisik.

3. Gerakan 1000 (Seribu) HPK

Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah periode krusial yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Masa ini dianggap sebagai "jendela kesempatan" dalam mencegah *stunting* karena proses

pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung sangat cepat dan membutuhkan dukungan gizi serta kesehatan yang optimal. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan dampak permanen terhadap fisik, kecerdasan, dan risiko penyakit di masa depan. Gerakan 1000 (seribu) HPK bertujuan untuk memastikan ibu hamil dan anak menerima perhatian gizi, kesehatan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Pendekatan dalam gerakan ini melibatkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, yang saling melengkapi untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung dari *stunting*.

Gerakan 1000 HPK yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronik, pemberian tablet tambah darah dan asam folat, pemberian obat cacing pada ibu hamil, melindungi ibu hamil dari penyakit menular, mendorong inisiasi menyusui dini bagi ibu melahirkan, mendorong pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, mendorong kelanjutan pemberian Air Susu ibu sampai dengan dua puluh tiga bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air susu Ibu, pemberian imunisasi lengkap dan pencegahan dan pengobatan diare.

Selain diberikan kepada ibu hamil KEK, PMT juga diperuntukkan bagi balita

stunting. Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 106 balita *stunting* di Kelurahan Margomulyo. Namun, berkat intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, jumlah tersebut menurun secara signifikan menjadi 12 anak pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program intervensi yang mencakup pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michael Juarez dalam penelitiannya yang berjudul *Interventions to Reduce Child Stunting in Rural Guatemala: A Quality Improvement Model*, bahwa kebijakan PMT yang dilakukan di pedesaan diperlukan untuk menangani kekurangan gizi kronis atau *stunting* yang tinggi. Faktor institusi dan rezim yang berkuasa juga merupakan faktor yang sangat memengaruhi keberjalanan saat intervensi gizi berlangsung.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar adalah tolok ukur atau pedoman yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan suatu kebijakan sedangkan sasaran menentukan fokus penerima manfaat agar kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat guna. Dalam rangka terwujudnya konvergensi program dalam percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* Terintegrasi di

Kelurahan Margomulyo, Ngawi. Standarnya adalah penurunan angka prevalensi *stunting* dan pencegahan *stunting* baru sedangkan sasarannya adalah ibu hamil, anak balita, dan keluarga dengan risiko tinggi *stunting*. Untuk itu perlu dianalisis faktor kendala apa saja yang ditemukan dalam perwujudan konvergensi program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Ngawi.

Permasalahan dalam pengelolaan data, akurasi, dan keaktualan data merupakan salah satu fondasi keberhasilan program konvergensi *stunting*. Kendala seperti perpindahan tempat tinggal dan kurangnya mekanisme pembaruan data secara *real-time* menyebabkan intervensi yang kurang tepat sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaruan data yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat berdampak pada ketidaktepatan penyaluran bantuan atau intervensi yang diberikan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang diterapkan berupa koordinasi dengan PLKB di tingkat kecamatan untuk menjembatani data dan layanan, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peran lintas sektor dalam penyelesaian masalah data. Ini juga mengarah pada perlunya sistem pembaruan data yang lebih efisien agar program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah segala bentuk aset, baik manusia, anggaran, maupun fasilitas, yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks *stunting*, sumber daya ini mencakup personel, dana, dan sarana-prasarana untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kelurahan Margomulyo sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan Fasilitas penunjang.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dan elemen penting dalam keberhasilan program konvergensi *stunting* di Kelurahan Margomulyo. Pelatihan yang diberikan kepada kader telah terbukti meningkatkan kapasitas mereka dalam beberapa aspek yang krusial. Kualitas SDM kader mengalami peningkatan signifikan, di mana kader kini mampu mengenali risiko *stunting* dan memberikan edukasi yang tepat kepada kelompok sasaran, seperti ibu hamil, baduta, dan balita.

Ketersediaan jumlah tenaga pelaksana dalam program konvergensi *stunting* di Kabupaten Ngawi, khususnya di Kelurahan Margomulyo, menunjukkan kesiapan yang memadai untuk menangani permasalahan *stunting* sehingga termasuk sebagai faktor pendukung pelaksanaan

program. Di tingkat kabupaten, terdapat 670 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang masing-masing beranggotakan 3 orang, sehingga jumlah kader pendamping yang tersedia mencapai 2010 orang. Jumlah kader ini cukup untuk menangani 1275 balita *stunting* di wilayah Ngawi, dengan rasio rata-rata 1 tim mendampingi 2 balita *stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga pelaksana di tingkat kabupaten sudah mencukupi untuk menjangkau jumlah balita yang membutuhkan pendampingan.

Fasilitas penunjang kesehatan di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi sebagai faktor pendukung yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam program konvergensi *stunting*, terutama dalam memastikan tercapainya perbaikan status gizi ibu hamil, balita, dan baduta. Layanan kesehatan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting, antara lain pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian suplemen, imunisasi, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana ialah sifat, kompetensi, dan peran yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di

Kelurahan Margomulyo Ngawi agen pelaksana juga sebagai faktor pendukung adalah pihak yang bertanggung jawab dalam struktur birokrasi untuk melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi.

Agen pelaksana dalam program penanganan *stunting* di Kelurahan Margomulyo memiliki karakteristik yang mendukung keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan program. Koordinasi terintegrasi menjadi salah satu aspek penting, di mana agen pelaksana diatur secara jelas dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan spesialisasi masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan keterpaduan antar agen pelaksana, sehingga program dapat dijalankan secara lebih terstruktur dan terarah. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, masing-masing agen pelaksana dapat fokus pada perannya, baik itu kader, bidan, maupun tokoh masyarakat, yang semuanya berperan dalam mendukung tercapainya tujuan program.

Selain itu, fokus pada kolaborasi juga menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program. Pengarahan dari tingkat atas yang jelas dan pelaksanaan di lapangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kader kesehatan hingga tokoh masyarakat, menciptakan sinergi yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat.

Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan mendukung pelaksanaan program secara maksimal.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah proses pertukaran informasi, koordinasi, dan kolaborasi yang terstruktur antara berbagai lembaga, instansi, atau kelompok yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Konsistensi penyaluran informasi sebagai faktor pendukung merupakan aspek penting dalam keberhasilan program penanganan *stunting* di Kelurahan Margomulyo Ngawi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat upaya yang cukup signifikan dalam menyampaikan informasi yang konsisten melalui materi edukasi yang terstandarisasi.

Satgas *Stunting* dan kader kesehatan memainkan peran aktif dalam menyampaikan informasi, baik melalui pertemuan formal maupun melalui kunjungan langsung ke rumah warga. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti *WhatsApp* dan penggunaan poster di tempat umum juga berkontribusi dalam meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat, memudahkan mereka untuk mengakses pesan-pesan terkait pentingnya penanganan *stunting*.

Meskipun demikian, tidak semua informasi disampaikan secara rutin dan

terstruktur sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat merasa bahwa panduan yang diberikan kurang rinci dan spesifik. Komunikasi yang tidak konsisten atau kurang jelas dapat menyebabkan kerancuan, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh masyarakat dengan cara yang lebih terstruktur dan terstandarisasi.

Keseragaman informasi yang disalurkan di Kelurahan Margomulyo Ngawi juga sebagai faktor pendukung yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program penanganan *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian, keseragaman informasi ini didukung oleh pedoman terstandarisasi dari pemerintah, yang memastikan materi edukasi yang disampaikan selaras dengan kebijakan pusat. Pemantauan rutin yang dilakukan oleh Satgas *Stunting* turut membantu menjaga akurasi dan keseragaman informasi yang disalurkan, sehingga pesan-pesan terkait penanganan *stunting* dapat diterima dengan konsisten oleh masyarakat.

Namun demikian, terdapat kendala terkait kurangnya keteraturan dalam penyaluran informasi di beberapa wilayah sebagai faktor penghambat, yang menyebabkan masyarakat menerima informasi yang tidak konsisten. Ketergantungan pada kader atau petugas

kesehatan untuk menyampaikan informasi ini menciptakan potensi perbedaan pemahaman atau kualitas komunikasi antar individu yang terlibat.

5. Sikap Pelaksana

Dukungan dan kontribusi agen pelaksana adalah segala bentuk tindakan, sumber daya, dan sikap yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam struktur pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan. Agen pelaksana adalah faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kelurahan Margomulyo Ngawi menunjukkan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan *stunting* di Kelurahan Margomulyo mencerminkan kerja sama yang erat antara kader kesehatan, bidan kelurahan, kader puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK) *Stunting*, dan Dinas Kesehatan. Para kader kesehatan berperan sebagai perpanjangan tangan utama di masyarakat, sementara bidan desa dan Puskesmas lebih fokus pada penanganan medis dan aspek kesehatan lanjutan, menciptakan sinergi dalam upaya penanganan *stunting*.

Edukasi yang diberikan melalui berbagai saluran, seperti posyandu, kunjungan rumah, dan kegiatan komunitas, terbukti efektif dalam menjangkau

masyarakat langsung. Melalui pendekatan ini, masyarakat lebih mudah menerima informasi terkait pentingnya gizi, pola hidup sehat, serta peran penting pemberian makanan tambahan. Layanan kesehatan yang diberikan juga turut membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin dan kelompok rentan, yang sering kali menjadi sasaran utama dalam upaya penurunan *stunting*.

Terdapat kendala dalam implementasi kebijakan ini yang perlu diperhatikan agar program berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah adanya koordinasi yang tidak selalu maksimal antar agen pelaksana sebagai faktor penghambat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam kegiatan atau kurangnya kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di lapangan. Kendala tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme koordinasi antara agen pelaksana agar program dapat dijalankan dengan lebih terstruktur dan terarah.

6. Lingkungan

Lingkungan dalam konteks percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kondisi eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi program penurunan dan pencegahan *stunting*, mencakup diantaranya aspek sosial dan

ekonomi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Lingkungan ini menjadi landasan penting dalam mendukung atau menghambat efektivitas program. Dari hasil penelitian mengenai lingkungan dalam implementasi kebijakan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kelurahan Margomulyo, terdapat beberapa aspek sosial yang berperan penting dalam kesuksesan program.

Pertama, peran lingkungan sosial di Kelurahan Margomulyo Ngawi, menunjukkan potensi keberlanjutan program berbasis masyarakat yang cukup kuat. Dukungan komunitas sebagai faktor pendukung, yang salah satunya tercermin melalui penggalangan dana, memperlihatkan adanya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Pos gizi, sebagai simbol nyata kepedulian ini, memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi program. Pos gizi tidak hanya memberikan layanan terkait masalah gizi, tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan keluarga.

Tingkat kesadaran ibu tentang pentingnya gizi masih sangat beragam, yang menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat. Edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjangkau kelompok ibu yang belum

paham atau yang terhambat oleh faktor ekonomi. Meskipun program bantuan makanan tambahan sangat membantu dalam mencukupi sebagian kebutuhan gizi, program ini tidak sepenuhnya menutupi kebutuhan harian keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Kendala ini menunjukkan perlunya peran serta lebih besar dari program pemerintah dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan gizi keluarga.

Selain itu, partisipasi keluarga juga menghadapi kendala, salah satunya kurangnya dukungan dari suami atau anggota keluarga lainnya sebagai faktor penghambat dalam program penurunan dan pencegahan *stunting*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program *stunting* tidak dapat dipandang hanya dari peran ibu, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh anggota keluarga. Budaya dan kebiasaan tradisional yang masih dianut oleh sebagian masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif dan sensitif terhadap budaya lokal diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan keluarga dalam program *stunting*.

Kedua, aspek ekonomi di Kelurahan Margomulyo Ngawi juga sebagai faktor pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan program percepatan

penurunan dan pencegahan *stunting*. Meskipun wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan potensi ekonomi yang baik, masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian keluarga miskin menghambat akses mereka terhadap makanan bergizi. Keterbatasan pendapatan merupakan faktor penghambat yang menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar lainnya, sementara pola makan bergizi sering kali tidak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi meskipun secara teori akses terhadap makanan yang lebih baik seharusnya lebih mudah di wilayah perkotaan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pengetahuan masyarakat mengenai cara menyediakan makanan bergizi dengan bahan yang sederhana dan terjangkau. Ketidaktahuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari menjadi tantangan yang harus diatasi melalui edukasi yang lebih terarah. Program edukasi yang mengajarkan masyarakat bagaimana memanfaatkan bahan pangan lokal untuk membuat makanan bergizi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi

Pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi mengacu pada pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ngawi No. 4.A Tahun 2020. Implementasi percepatan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo dilakukan melalui indikator kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan gerakan 1000 HPK. Implementasi yang sesuai dengan Perbup tersebut sudah menunjukkan kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah dan pemangku kepentingan setempat dalam menjalankan program ini dengan benar.

Program percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Ngawi memberikan penurunan angka *stunting* di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada jumlah balita *stunting* di Kelurahan Margomulyo mengalami penurunan dari 106 balita pada tahun 2023 menjadi 12 balita pada tahun 2024. Meskipun demikian, Program Kemandirian Keluarga belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar keluarga di Kelurahan Margomulyo sudah

memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan gizi, tetapi masih ada sebagian keluarga belum konsisten menerapkan penyediaan pola makan bergizi karena terkendala faktor ekonomi dan kebiasaan makan.

Sebagian keluarga lagi masih percaya bahwa balita *stunting* disebabkan oleh keturunan bukan disebabkan faktor gizi. Sementara, pengetahuan mengenai kesehatan secara umum sebagian besar keluarga sudah memahaminya hanya untuk pengetahuan tentang kesehatan gizi, tetapi masih ada sebagian lagi yang belum paham, seperti KEK, anemia dan cacangan pada ibu hamil bisa melahirkan bayi *stunting*, sehingga masih menjadi tantangan Kelurahan Margomulyo dan TPPK untuk terus menerus melakukan edukasi sehingga membentuk kesadaran dan pengetahuan masyarakatnya hingga dapat terbentuk secara merata mengenai pentingnya kesehatan gizi pengetahuan mengenai gangguan kesehatan gizi. Sedangkan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan 1000 HPK telah menunjukkan hasil pelaksanaan yang dapat mewujudkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan lintas sektor. Dengan demikian, aksi dari percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* dapat terbentuk dan mencapai target Kelurahan Margomulyo *Zero Stunting*.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo adalah komitmen yang kuat dari Pemerintah Kelurahan Margomulyo, Pemerintah Kabupaten Ngawi dan para pihak terkait dalam menangani masalah *stunting*. Keberadaan tim percepatan penurunan *Stunting* yang terdiri dari kader kesehatan, tenaga medis, kader PKK, kader KB di tingkat kelurahan sangat membantu dalam memberikan perhatian khusus kepada keluarga dengan balita *stunting* atau ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi. Pelatihan dan pemberdayaan kader yang dilakukan secara rutin juga berperan besar dalam meningkatkan kapasitas pelaksana program, sehingga mereka lebih efektif dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga. Para kader ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi ibu hamil dan balita *stunting*, serta memberikan informasi terkait gizi seimbang dan pola hidup sehat yang dapat mencegah *stunting*.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini ialah pengetahuan masyarakat yang belum merata terhadap kesehatan gizi, terdapat masalah pada pengelolaan, pembaharuan, dan aktualisasi data yang menyebabkan

keterlambatan pembaruan data berdampak intervensi kurang tepat sasaran. Dana APBD dari Pemerintah yang terbatas tidak mencukupi untuk pendampingan lebih lanjut sehingga menghambat kelancaran distribusi PMT dan bantuan lainnya, oleh sebab itu dilakukan inovasi-inovasi program dalam membantu permasalahan keterbatasan dana, yakni salah satunya adalah Program Orang Tua Asuh, serta kurangnya partisipasi dan dukungan dari suami dan keluarga lainnya pada ibu hamil dan menyusui berdampak pada pelaksanaan program yang berbasis keluarga.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran dan rekomendasi untuk menjawab permasalahan penelitian percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Ngawi:

- 1) Penguatan Edukasi Kesadaran Gizi oleh Kasi Kesra Kelurahan Margomulyo dan pendampingan oleh DP3AKB melalui peningkatan intensitas penyuluhan berbasis kelompok kecil dengan pendekatan yang lebih personal.
- 2) Penguatan Pemantauan dan Evaluasi oleh *Technical Assistant* Satgas *Stunting* melalui pembentukan tim pemantauan yang terdiri dari kader Puskesmas, bidan, dan perangkat

Kelurahan Margomulyo untuk memastikan keluarga dengan balita *stunting* dan ibu hamil KEK mendapatkan perhatian khusus.

- 3) Diperlukan melakukan kerja sama seperti dengan Bank yang memang lokasinya berada di sekitar Kelurahan Margomulyo untuk mendukung program melalui CSR dalam penyediaan PMT maupun fasilitas sanitasi dan pelibatan organisasi masyarakat dan karang taruna.

Dengan langkah-langkah strategis ini, program percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo dapat berjalan lebih optimal, menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut kemudian akan menghasilkan angka *stunting* dapat terus menurun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat, khususnya bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aida, Ade Nurul. 2019. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian *Stunting* di Indonesia. *Jurnal Budget*: Vol.4, No. 2
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1)*. CV Pustaka Setia
- Astuti, Retno Sunu & Warsono, Hardi (2020). *Collaborative Governance*. 161. Universitas Diponegoro.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. 2018. *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, CA: ABC-Clio.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hariyati, A. M. S., Nurayuni, I., Sa'diyah, I. S., Herawati, A. R., & Kismartini, K. (2022). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(3), 203-208.
- Henry, Nicholas. 1995. *Public Administrator and Public Affairs*. Sixth Edition, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- Juarez, M., Dionicio, C., Sacuj, N., Lopez, W., Miller, A. C., & Rohloff, P. (2021). Community-Based Interventions to Reduce Child *Stunting* in Rural Guatemala: A Quality Improvement Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2), 773.
- Keban, YT. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kiranasari, F., Tohardi, A., & Aisyah, S. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1216-1227.
- Kodish, S. R., Farhikhtah, A., Mlambo, T., Hambayi, M. N., Jones, V., & Aburto, N. J. (2022). Leveraging The Scaling Up Nutrition Movement to Operationalize *Stunting* Prevention Activities: Implementation Lessons from Rural Malawi. *Food and Nutrition Bulletin*, 43(1), 104-120.
- Lailou, A., Gauthier, L., Wieringa, F., Berger, J., Chea, S., & Poirot, E. (2020). Reducing Malnutrition in Cambodia. A Modeling Exercise to Prioritize Multisectoral Interventions. *Maternal & Child Nutrition*, 16, e12770.
- Moleong, L.J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nicholas, H. 1995. Public Administration and Public Affairs (diterjemahkan oleh. Luciana D. Lontoh). Jakarta: Rajawali
- Pakaya, Y., Kadir, S., & Kasim, V. N. A. (2023). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Gorontalo. *Health Information: Jurnal Penelitian*, e1244-e1244.
- Pasolong, Harbani 2017. TEORI ADMINISTRASI PUBLIK. Bandung: Alfabeta
- Perdamean, S. R., Kismartini, K., Sardjijo, S., & Mukhlisa, A. N. (2023). Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Eboni*, 5(1), 1-10.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. ISBN: 979-8433-37-X.
- Supriyanto, H., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 241-254.
- Tami, N. A., Hanani, R., & Kismartini, K. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang. *Nova Idea*, 1(3), 98-112.
- Wididiati, P. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek) (*Doctoral Dissertation*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Widyastuti, Y., Arenawati, A., & Prafitri, N. (2022). Implementasi Kebijakan Konvergensi Pencegahan *Stunting* melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2).

Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Bupati Ngawi No. 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.